

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dengan judul **Analisis Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Framework of Action on Marine Debris**, dapat disimpulkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan penyumbang sampah laut terbanyak. Hal tersebut menjadi tantangan bagi ASEAN, dimana sampah laut sendiri akan mengancam keamanan di kawasan ini. Dalam menyelesaikan permasalahan sampah laut di Asia Tenggara, negara-negara mulai menerapkan kebijakan secara mandiri, akan tetapi sampah laut digolongkan sebagai isu *transborder*, sehingga membutuhkan kerjasama dalam menangani permasalahan tersebut. Adanya hal tersebut memunculkan terbentuknya *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*, sebagai kerangka aksi dalam memerangi sampah laut di kawasan ini serta didalam negara-negara anggota ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang sampah dan juga turut berkomitmen dalam penyelesaian permasalahan sampah laut, ikut serta dalam meratifikasi AFAMD. Dalam meratifikasi AFAMD Indonesia mematuhi kerangka kebijakan yang ada di dalamnya, dimana terdapat empat area prioritas yaitu : a) Perencanaan serta dukungan kebijakan. b) Riset, inovasi, dan peningkatan kapasitas. c) kesadaran publik, pendidikan, dan penjangkauan. d) Keterlibatan sektor swasta. Dalam penerapan empat area prioritas yang ada Indonesia memberikan strategi dan kebijakan dalam memerangi permasalahan sampah laut. pada tahap implementasi kebijakan Indonesia mengalami beberapa kendala diantaranya adalah belum menyediakan akses informasi terintegrasi dan real time mengenai jumlah sampah laut, mekanisme pendanaan, pengawasan, penegakan hukum yang transparan, dan penelitian holistik tentang sinkronisasi peraturan pusat daerah dengan peraturan presiden dalam menangani permasalahan sampah laut.

Dengan adanya hal tersebut perubahan perilaku yang sangat penting dalam penanganan permasalahan sampah laut di Indonesia belum terbentuk, sehingga kebocoran sampah laut dari darat masih menghantui Indonesia. Dalam penerapan kebijakan ataupun program pemerintah dalam penyelesaian isu sampah laut masih belum terealisasi dengan maksimal, sehingga target program seperti pembangunan PLTSA, *river clean-up systems*, *plastic to fuel*, *plastic-tar road*, dan *model integrated waste management* belum terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak sampah yang tidak dikelola. Dengan adanya hal tersebut level kepatuhan Indonesia berada pada *passive compliance*, dimana Indonesia masih memerlukan adanya kebijakan lebih lanjut ataupun penanganan yang lebih sinergi dalam memerangi permasalahan sampah laut.

5.2 Saran

Penelitian ini memberikan penjelasan tentang Bagaimana Tingkat Kepatuhan Indonesia terhadap *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* dalam menangani permasalahan sampah laut. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang terdapat pada penulisan ini. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi ataupun referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperdalam dan memperkuat mengenai keberlanjutan penerapan *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* di Indonesia. Dimana Indonesia sendiri memiliki RAN yang dirancang untuk tahun 2019-2025 dengan pembaruan yang ada dapat melengkapi penelitian ini.